

9-30-2017

Keberhasilan Kelompok Tani Sekar Mulyo dalam Memengaruhi Kebijakan Pemerintah Kota Batu Tahun 2009-2016

Hisab Akbar Regaty
Sagarpa FISIP UI, hizabakbar@gmail.com

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/politik>



Part of the [Human Ecology Commons](#), [Other Political Science Commons](#), and the [Politics and Social Change Commons](#)

Recommended Citation

Regaty, Hisab Akbar (2017) "Keberhasilan Kelompok Tani Sekar Mulyo dalam Memengaruhi Kebijakan Pemerintah Kota Batu Tahun 2009-2016," *Jurnal Politik*: Vol. 3: Iss. 1, Article 4.

DOI: 10.7454/jp.v3i1.1095

Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/politik/vol3/iss1/4>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Social and Political Sciences at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in *Jurnal Politik* by an authorized editor of UI Scholars Hub.

Keberhasilan Kelompok Tani Sekar Mulyo dalam Memengaruhi Kebijakan Pemerintah Kota Batu Tahun 2009-2016

HISAB AKBAR REGATY*

Sagarpa FISIP UI

Jl. Prof. Dr. Selo Soemardjan, FISIP, Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, 16424

Email: hizabakbar@gmail.com

ABSTRAK

Artikel ini akan menguraikan faktor-faktor yang mampu mendorong keberhasilan sebuah organisasi *civil society* di tingkat desa untuk memengaruhi kebijakan pemberian bantuan oleh pemerintah daerah, dengan studi kasus kelompok tani Sekar Mulyo di Kota Batu. Pertanyaan yang diangkat adalah mengapa kelompok tani Sekar Mulyo berhasil memengaruhi kebijakan pemberian bantuan infrastruktur dan pertanian Kota Batu tahun 2009-2016? Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan merujuk data primer berupa wawancara dan data sekunder berupa dokumen tertulis. Faktor-faktor yang menjadi penentu keberhasilan yang ditemukan adalah strategi kolaboratif organisasi *civil society*, modal sosial, dan hubungan klientelisme.

Kata kunci: strategi organisasi *civil society*, modal sosial, hubungan klientelisme, kelompok tani Sekar Mulyo

ABSTRACT

This article will outline the factors that can drive the success of a civil society organization at the village level in influencing decisions by local governments, with case study of the Sekar Mulyo farmer group in Batu City. The question raised is why the Sekar Mulyo farmer group influences the local agriculture and infrastructure policy more successfully in Batu City in 2009-2016. This article uses qualitative approach by using primary and secondary data. The research found that there are determinants of success are collaborative strategies of civil society organizations, social capital, and clientelistic relation.

Keywords: civil society strategy, social capital, relationship of clientelism, Sekar Mulyo farmer group

DOI: <http://doi.org/10.7454/jp.v3i1.57>

PENDAHULUAN

Organisasi *civil society* merupakan aktor politik yang otonom dari negara tetapi memiliki hubungan dengan negara itu sendiri, atau sering disebut dengan “*non-state actor*” (Cohen dan Arato 1992, 25). Posisi *civil society* pada dasarnya berada di luar pemerintahan; namun tetap

* Penulis adalah Pegiat Seni Sagarpa FISIP UI.

berada di dalam pengawasan dan harus dihormati keberadaannya oleh otoritas negara (Diamond 1994, 60). Peran penting dari kehadiran civil society di antaranya adalah menjadi penghubung berbagai kepentingan di dalam masyarakat dengan cara menjadi sarana komunikasi politik antara masyarakat dengan negara, serta mampu menjadi penyeimbang kekuatan negara yang bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik (Perdana 2015, 28).

Pasca runtuhnya kekuasaan Orde Baru kehidupan politik di Indonesia semakin demokratis. Demokratisasi tersebut ditandai seperti dengan adanya penguatan peran lembaga-lembaga politik, perbaikan mekanisme prosedural seperti pemilihan umum yang transparan dan adil, dan desentralisasi yang menciptakan pergeseran kekuatan politik ke tingkat lokal (Perdana 2009, 1). Kondisi yang demikian memunculkan semakin tumbuhnya kekuatan-kekuatan politik di dalam masyarakat seperti kelompok-kelompok yang sering disebut dengan *civil society* dan partai politik. Desentralisasi dalam keterbukaan politik juga berdampak pada organisasi *civil society* yang berkembang hingga ke tingkat lokal (Hadiz 2013, 4), bahkan juga mendorong tumbuhnya organisasi *civil society* di tingkat desa (Dwipayana 2003, 104). Walaupun sering kali luput dari pengamatan, diskusi mengenai organisasi *civil society* di tingkat desa menjadi penting karena keberadaan mereka yang dekat dengan *grassroots* (masyarakat akar rumput). Kondisi *grassroots* akan mendorong masyarakat bergabung secara sukarela untuk mewujudkan kepentingan bersama dengan karakteristik yang lebih demokratis dan tidak hierarkis (Kunreuther 2011, 56). Organisasi *civil society* di lingkup desa merupakan sebuah alternatif baru, yang mampu menaikkan posisi daya tawar terhadap elite-elite desa (Dwipayana 2003, 128). Studi-studi mengenai aktivitas *civil society* di tingkat pedesaan pun semakin banyak terutama dalam melihat keberhasilan ataupun masalah kelompok-kelompok civil society di negara-negara yang belum menerapkan demokrasi maupun yang sedang mengembangkan demokrasi. Tidak heran studi-studi *civil society* banyak menasar kasus-kasus di China hingga Ghana, Nigeria, maupun India yang menyoroti keberhasilan (seperti Rai 2001) maupun problem yang muncul (Mohan 2002).

Artikel ini mencoba memperkaya diskusi mengenai keberhasilan organisasi *civil society* di tingkat desa dalam praktik demokrasi dengan melihat Indonesia sebagai contoh dari negara yang sedang mengkonsolidasi demokrasi. Keberhasilan *civil society* menunjukkan indikasi adanya dinamika hubungan yang relatif sehat dalam sudut pandang demokrasi karena input atau masukan dari masyarakat menjadi pertimbangan dalam perumusan kebijakan di tingkat lokal. Untuk itu artikel membahas tiga faktor keberhasilan kelompok tani Sekar Mulyo yang berada di Kota Batu, Jawa Timur. Apabila ditarik ke dalam sebuah abstraksi konseptual menunjukkan bahwa strategi kolaboratif, modal sosial, dan hubungan klientelisme masih menjadi hal yang relevan di dalam mengkaji aktivitas *civil society* dan pencapaiannya. Konsep yang dikembangkan terkait organisasi *civil society* bermula dari keberadaannya di lingkup yang lebih luas; namun artikel ini yang mengangkat di lingkup desa masih bisa menjawab dengan kerangka konseptual yang sama. Perbedaan lingkup bukanlah hal yang secara langsung membedakan faktor keberhasilan organisasi *civil society*. Bahkan dengan melihat keterbatasan sumber daya yang mereka miliki dan membandingkan dengan pencapaian dalam memengaruhi kebijakan pemerintah lokal membuatnya menjadi kasus yang menarik untuk dikaji.

Kelompok tani Sekar Mulyo yang merupakan salah satu organisasi *civil society* di lingkup desa berhasil memengaruhi kebijakan pemberian bantuan infrastruktur dan pertanian oleh Pemerintah Kota Batu tahun 2009-2016. Kelompok tani Sekar Mulyo memiliki akses terhadap sumber daya ekonomi dan politik yang lebih sedikit dibandingkan organisasi *civil society* yang memiliki lingkup internasional ataupun nasional. Di dalam kondisi tersebut terdapat kemungkinan bahwa kelompok tani Sekar Mulyo akan kurang efektif dalam memengaruhi kebijakan Pemerintah Kota Batu. Namun, dalam kurun waktu tahun 2009 hingga 2016, kelompok ini ternyata lebih berhasil memengaruhi kebijakan pemberian bantuan infrastruktur dan pertanian dibandingkan kelompok tani lain di Desa Sidomulyo. Maka, fokus utama di dalam artikel ini adalah faktor-faktor keberhasilan kelompok tani Sekar Mulyo sebagai organisasi

civil society dalam memengaruhi kebijakan pemerintah daerah dengan mengambil fokus pada kebijakan infrastruktur dan pertanian.

Tercatat pada tahun 2009-2016 kelompok tani Sekar Mulyo telah berhasil mendorong pembangunan infrastruktur di Desa Sidomulyo sebesar Rp 1.263.738.000,00 (Data Pemerintah Kota Batu, 2009-2016; wawancara dengan Sugeng Hariono Anggota DPRD Kota Batu, 2017). Apabila dibandingkan dengan kelompok tani lain, kelompok tani Sekar Mulyo mampu memengaruhi kebijakan infrastruktur, sedangkan kelompok tani lain hanya sebatas mendapatkan bantuan pertanian (Tabel 1). Keberhasilan tersebut didorong oleh fakta bahwa kelompok tani ini merupakan kelompok tani tertua dan terbesar di Desa Sidomulyo dan memiliki kedekatan terhadap elite-elite politik dibandingkan kelompok tani lain (SK Pengukuhan Walikota Batu No: 180/72/KEP/422.012/2012; wawancara dengan Sunari Ketua Gapoktan Desa Sidomulyo, 2017).

Tabel 1
Hibah Pertanian Dinas Pertanian Kota Batu

No.	Nama Kelompok Tani	Jenis Bantuan	Jumlah	Tahun Pemberian
1	Kelompok tani Sumber Rejeki	Traktor Tangan	1 Unit	2013
2	Kelompok tani Kreesan Mulyo	<ul style="list-style-type: none"> • Peralatan untuk bonsai 	<ul style="list-style-type: none"> • 33 buah tang krekut • 5 unit bor botol • 3 unit gergaji listrik • 35 buah gunting ranting • 33 buah gergaji ranting 	2014
3	Gapoktan Desa Sidomulyo	<ul style="list-style-type: none"> • Knapsack • Alat pengolah pupuk organik • Alat pengolah pupuk organik 	1 Paket	2014
4	Kelompok tani Sido Makmur	<ul style="list-style-type: none"> • Drip irigasi dan perlengkapannya • Kultivator • Hand Traktor 	1 paket	2016
5	Kelompok tani Gelora Bunga	<ul style="list-style-type: none"> • Power Sprayer 	3 Unit	2016
6	Kelompok tani Kreesan Mulyo	<ul style="list-style-type: none"> • Hand Traktor 	1 Unit	2016
7	Kelompok tani Guyub Rukun	<ul style="list-style-type: none"> • Peralatan kolam, pakan, bibit 	7 Paket	2016
8	Seluruh Kelompok tani	<ul style="list-style-type: none"> • Modal pertanian 	Masing-masing Rp 10.000.000,00	2016

Sumber: diolah dari Data Inventarisasi Alat dan Mesin Pertanian Dinas Pertanian Kota Batu 2016 dan Data Hibah Bapeda Dinas Pertanian Kota Batu tahun Anggaran 2016-2017.

STUDI LITERATUR

Dalam memahami konsep *civil society* penelusuran konsep-konsep lain yang dianggap sesuai dengan permasalahan yang diangkat di dalam tulisan ini perlu dilakukan. Studi literatur ini akan mencoba menggambarkan pencapaian *civil society* dengan melihat strategi kolaboratif, konsep modal sosial dan klientelisme. Di dalam kasus yang diangkat di dalam artikel ini menggunakan pendekatan strategi kolaboratif *civil society*. Strategi kolaboratif merupakan sebuah strategi *civil society* yang cukup lunak terhadap hubungannya dengan pemerintah. Model ini seringkali melibatkan *civil society* di dalam arena terbuka dengan otoritas sehingga terjadi sebuah agenda lobi dengan pemerintah lokal, lembaga, atau dengan pembuat kebijakan lainnya (Short 1996, 270). Di dalam model ini, *civil society* lebih menggunakan cara-cara bekerjasama dengan pemerintah selaku pembuat kebijakan publik dengan berusaha menemukan titik temu kepentingan di antara kedua pihak yang saling menguntungkan. Strategi ini mendorong *civil society* untuk menjalin hubungan dengan pemerintah, terutama dalam isu-isu yang menjadi kepentingan *civil society* dengan melakukan lobi (Mehta 2009, 29).

Pendekatan strategi kolaboratif ini dianggap relevan karena di dalam menjalankan perannya, sebuah organisasi *civil society* tidak akan pernah terlepas dari negara atau pemerintahan yang demokratis (Harris 2008). Organisasi *civil society* yang modern merupakan sebuah institusi yang sejalan dengan hukum yang ada, dan bertindak mandiri; namun tidak serta merta menjadikannya sebagai oposisi terhadap pemerintah (Cohen dan Arato 1992). Posisi utama dari adanya organisasi *civil society* di dalam sebuah masyarakat yang demokratis adalah menjaga keseimbangan dan kesehatan demokrasi, sebagai kelompok sukarela yang berdasarkan tindakan bersama untuk mendorong kepercayaan dan mempromosikan solidaritas sosial (Fukuyama 1999). Maka pendekatan strategi kolaboratif menjadikan sebuah organisasi *civil society* tetap berada di luar pemerintahan, namun tetap sejalan dengan kepentingannya sesuai dengan hukum yang berlaku dan demokrasi. Di sinilah sebenarnya kesempatan dari organisasi *civil society* untuk tetap mampu

memengaruhi kebijakan pemerintah tanpa harus melulu menjadi oposisi atau penentang.

Pemahaman mengenai *civil society* sendiri telah banyak dihubungkan dengan konsep modal sosial (Bailer 2009, 1). Modal sosial organisasi *civil society* akan terbentuk ketika masyarakat yang saling percaya satu sama lain hidup di dalam sebuah lingkungan masyarakat yang baik dan akan cenderung untuk terikat di dalam suatu komunitas yang dipercayainya (Putnam 1993, 179). Hal tersebut akan menjadikan organisasi *civil society* sebagai institusi yang dekat dengan masyarakat (Dagher 2017, 57). Dengan demikian, modal sosial merupakan kelengkapan-kelengkapan yang dimiliki oleh kelompok sosial, yaitu jaringan, norma, dan kepercayaan, yang akan menciptakan koordinasi dan kerjasama untuk hasil yang saling menguntungkan (Putnam 1993, 8). Komunitas masyarakat yang dianggap memiliki modal sosial percaya satu sama lain akan bertindak sesuai dengan keadilan dan hukum. Pemimpin dalam komunitas seperti ini relatif bertindak jujur dan berkomitmen dalam kesetaraan. Hubungan sosial dan politik terbentuk berdasarkan hubungan yang bersifat horizontal-tidak hierarkis. Komunitas-komunitas ini memegang nilai-nilai solidaritas, partisipasi masyarakat, dan integritas, sehingga tercipta kehidupan yang demokratis (Putnam 1993, 8).

Hubungan dari keterkaitan masyarakat seperti yang dijelaskan dalam konsep modal sosial, juga dilakukan berdasarkan koordinasi dan komunikasi penyebarluasan informasi di dalam meningkatkan kepercayaan dari setiap anggotanya. Hal tersebut akhirnya akan menciptakan keberhasilan kolaborasi antar masyarakat dalam sebuah “*public goods*”, yang bukan merupakan urusan perseorangan, melainkan urusan bersama. Proses inilah yang akan menciptakan partisipasi politik yang baik antar komunitas masyarakat dengan pihak lainnya di dalam mengurus kepentingan-kepentingan publik (Putnam 1993, 10).

Di dalam partisipasi inilah akhirnya mereka akan melibatkan diri di dalam proses pembuatan kebijakan. Keterlibatan ini hanya bisa terjadi ketika rasa percaya, seperti yang dijelaskan pada konsep modal sosial, dilakukan dengan cara kolaboratif. Hal tersebut akan mendorong relasi antara komunitas masyarakat dengan elite-elite pemerintah sela-

ku pembuatan kebijakan yang bermodalkan rasa percaya berdasarkan norma-norma yang telah disepakati. Hubungan yang saling menguntungkan akan terjadi antara komunitas masyarakat dengan elite. Di sinilah terjadinya kolaborasi yang semakin kuat antara komunitas masyarakat dengan elite-politik (Boix dan Posner 1996, 7). Hubungan kolaborasi ini di dalam praktiknya di Indonesia akan menjadi hubungan klientelisme (Aspinall dan Sukmajati 2015).

Hubungan klientelisme merupakan sebuah sifat relasi kekuasaan persoalistik antara politisi dan masyarakat sebagai pendukungnya yang di dalamnya terjadi pertukaran kepentingan yang saling menguntungkan (Aspinall dan Sukmajati 2015, 4). Pertukaran kepentingan ini adalah dukungan suara bagi politisi dan masyarakat yang mendukungnya mendapatkan bantuan material atau lainnya sesuai kepentingannya yang sering disebut dengan “*clientelistic goods*” (Allen 2013, 3). Faktor kondisi besarnya masyarakat sebagai konstituen mengharuskan setiap politisi yang terjun di dalam pemilihan legislatif harus mendapatkan dukungan sebesar-besarnya yang cara efektifnya adalah hubungan klientelisme. Selain itu, kurangnya peran partai politik dalam kedekatan dengan *grassroots* mendorong setiap politisi untuk menjalin hubungan kedekatan dengan *grassroots* itu sendiri (Aspinall dan Sukmajati 2015, 5). Keberhasilan pemberian dukungan ini terdapat faktor penting, yaitu basis dukungan dan kepercayaan sosial. Di dalam praktiknya, upaya-upaya untuk menjalin hubungan seperti itu sebagian besar dilakukan secara tertutup dan informal.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam artikel ini ialah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan rangkaian proses upaya untuk mengeksplorasi dan memahami permasalahan yang berasal dari ranah sosial atau kemanusiaan (Cresswell 2003, 17). Artikel ini akan menjawab pertanyaan eksplanatif untuk menjelaskan sebuah pertanyaan “mengapa” dalam rangka untuk menjelaskan penyebab sebuah faktor memengaruhi faktor lain dalam kasus yang diteliti (Neuman 2014, 39). Artikel ini menggunakan studi kasus dalam metode pemilihan kasus-

nya. Alasan memilih studi kasus karena akan mempermudah dalam memahami pembahasan yang diangkat. Artikel ini menggunakan data primer berupa wawancara dengan narasumber yang mengerti permasalahan yang dikaji dan data sekunder.

STRATEGI KOLABORATIF KELOMPOK TANI SEKAR MULYO

Kelompok tani Sekar Mulyo sebagai organisasi *civil society* dalam keberhasilannya memengaruhi kebijakan pemberian bantuan infrastruktur dan pertanian memiliki strategi yang digunakan. Agenda kepentingan dan latar belakang akan memengaruhi strategi yang dipilih oleh kelompok tani Sekar Mulyo. Dilihat dalam aspek agenda kepentingan, jelas bahwa kelompok tani Sekar Mulyo memiliki kepentingan yang merupakan representasi dari petani yang menjadi anggotanya (wawancara dengan Tono Ketua Kelompok tani Sekar Mulyo, 2017). Kepentingan inilah yang mendorong kelompok tani Sekar Mulyo untuk merumuskan strateginya yang dijadikan acuan. Kepentingan anggota kelompok tani Sekar Mulyo berasal dari latar belakangnya sebagai petani tanaman hias (wawancara dengan Tono Ketua Kelompok tani Sekar Mulyo, 2017). Latar belakang tersebut akhirnya mendorong mereka untuk mendapatkan bantuan infrastruktur dan kebutuhan pertanian sebagai penunjang usaha pertaniannya. Latar belakang sebagai petani di Desa Sidomulyo tidak hanya dimiliki oleh kelompok tani Sekar Mulyo saja, namun juga oleh kelompok-kelompok tani lain.

Strategi kolaboratif yang dilakukan kelompok tani Sekar Mulyo dilakukan dengan cara lobi secara langsung. Secara formal, setiap kelompok tani mampu melakukan hubungan kelembagaan dengan pihak-pihak lain yang terlibat dalam proses pembuatan kebijakan pemberian bantuan. Namun hanya kelompok tani Sekar Mulyo yang mampu melakukan komunikasi dengan cara lobi langsung yang sifatnya lebih mendalam dan personal. Di dalam lobi langsung inilah terjadi penyatuan dan pertukaran kepentingan antara kelompok tani Sekar Mulyo dengan Suharto sebagai kepala desa dan Sugeng sebagai anggota

DPRD Kota Batu (wawancara dengan Sunari Ketua Gapokta Desa Sidomulyo, 2017).

Adanya komunikasi informal yang bersifat personal dilakukan oleh kelompok tani Sekar Mulyo ternyata lebih mampu meningkatkan daya tawar mereka dalam melakukan pendekatan terhadap pihak-pihak lain yang juga terlibat dalam proses pembuatan kebijakan. Data temuan lapangan menjelaskan bahwa di dalam konteks kehidupan masyarakat desa hubungan kedekatan personal masih memainkan peranan penting.

Keadaan demikian menunjukkan adanya kesamaan yang dilakukan oleh organisasi *civil society* yang berada dalam cakupan lebih luas. Keterbukaan politik di Indonesia pasca reformasi ternyata tidak bisa langsung membuat organisasi *civil society* mampu menjalankan perannya dengan baik. Di lingkup nasional masih banyak organisasi *civil society* yang harus membangun hubungan-hubungan kedekatan dengan elite-elite politik lain. Apabila digambarkan dalam lingkup desa, artikel ini menunjukkan kelompok tani yang tidak memiliki strategi untuk membangun kedekatan dengan elite-elite desa pengaruhnya akan lebih kecil di dalam proses pembuatan kebijakan.

Data temuan lapangan memperlihatkan bahwa strategi kolaboratif merupakan strategi yang lebih menguntungkan bagi kelompok tani Sekar Mulyo yang berada di lingkup kecil dan akses terhadap sumber daya yang lebih sedikit. Karakteristik dari konsep strategi kolaboratif ini adalah *civil society* tetap berada di luar pemerintahan, namun secara paralel tetap berhubungan dengan pemerintah di dalam sebuah kepentingan. Kelompok tani Sekar Mulyo menunjukkan bahwa kelompok ini berada di luar pemerintahan, namun tetap saling terhubung di dalam kebijakan-kebijakan yang merupakan kepentingan kelompok ini.

Berdasarkan penjelasan terkait perkembangan kelompok tani di Desa Sidomulyo, faktor strategi kolaboratif yang dilakukan oleh kelompok tani Sekar Mulyo masih belum cukup kuat untuk menjelaskan mengapa kelompok tani ini lebih berhasil memengaruhi kebijakan pemerintah dalam pemberian bantuan infrastruktur dan pertanian dibandingkan kelompok tani lain. Hal tersebut terjadi karena strategi

kolaboratif masih mungkin untuk ditiru oleh kelompok tani lain yang memiliki kesamaan lingkup aktivitasnya.

Pihak yang terlibat di dalam kontestasi yang telah melakukan pertukaran kepentingan dengan *civil society* akan selalu berusaha untuk membantu *civil society* di dalam meraih kepentingannya. Hal ini dilakukan karena jika di dalam prosesnya mereka tidak mampu membantu *civil society* meraih kepentingannya maka di dalam kontestasi politik berikutnya kemungkinan *civil society* tidak akan mendukungnya lagi.

Penjelasan mengenai keberhasilan strategi yang digunakan oleh kelompok tani Sekar Mulyo di dalam memengaruhi kebijakan merupakan jawaban dari pertanyaan penelitian yang diangkat bahwa strategi *civil society* yang dipilih akan memengaruhi keberhasilan kelompok tani Sekar Mulyo. Keberhasilan strategi kolaboratif kelompok tani Sekar Mulyo ini juga menunjukkan bahwa organisasi *civil society* yang berada di lingkup desa merupakan organisasi yang dekat dengan *grassroots*, sehingga dianggap lebih mampu merepresentasikan kepentingan masyarakat yang diwakilinya. Ketidakmampuan organisasi *civil society* dalam merepresentasikan masyarakat yang diwakilinya justru terlihat di organisasi *civil society* yang berada di lingkup lebih besar dan lebih modern. Ketidakmampuan tersebut terjadi karena semakin besar lingkungannya akan semakin jauh dari *grassroots* yang merupakan masyarakat yang diwakilinya.

MODAL SOSIAL KELOMPOK TANI SEKAR MULYO

Modal sosial merupakan hasil dari tumbuh dan berkembangnya organisasi *civil society* di tengah-tengah masyarakat yang saling percaya dan merupakan sebuah institusi yang dekat dengan masyarakat (Dagher 2017). Data temuan lapangan menunjukkan bahwa kelompok tani Sekar Mulyo yang lahir di tengah-tengah para petani tanaman hias di Desa Sidomulyo menjadi institusi yang dekat dengan mereka (wawancara dengan Tono Ketua Kelompok tani Sekar Mulyo, 2017). Modal sosial merupakan perangkat-perangkat yang dimiliki oleh organisasi *civil society* untuk menjalankan peran-perannya, yaitu kepercayaan, norma, dan jaringan (Putnam 1993). Keberhasilan kelompok tani Sekar Mulyo

bisa dilihat dengan modal sosial yang mereka miliki. Modal sosial ini menjadi salah satu faktor penting. Apabila kelompok tani lain berada di lingkup yang sama, tetapi perbedaan modal sosial yang dimilikinya menjadikannya kelompok tani yang tidak memiliki pengaruh dalam proses pembuatan kebijakan pemberian bantuan infrastruktur dan pertanian oleh Pemerintah Kota Batu.

Kelompok tani Sekar Mulyo yang merupakan kelompok tani tertua dan terbesar di Desa Sidomulyo mampu meningkatkan adanya rasa percaya di antara para petani tanaman hias Desa Sidomulyo (wawancara dengan Tono Ketua Kelompok tani Sekar Mulyo, 2017; Suharto Kepala Desa Sidomulyo, 2017). Kepercayaan ini membuat kelompok tani Sekar Mulyo dapat merumuskan agendanya dengan solid. Dengan ini maka akan semakin kuat pula usaha kelompok tani ini mewujudkan kepentingannya. Salah satu anggota kelompok tani mengungkapkan bahwa dirinya bergantung dan percaya kepada kelompoknya karena menjadi satu-satunya tempat untuk mengakomodasi kepentingannya (wawancara dengan Budi, salah satu anggota kelompok tani Sekar Mulyo, 2017). Kepercayaan yang menghasilkan rasa solid ini meningkatkan daya tawar kelompok tani ini ketika harus menjalin hubungan dengan aktor-aktor politik lain.

Terkait dengan hal itu, soliditas kelompok tani itu dapat dilihat dengan jelas oleh pihak yang sering berhubungan dengan mereka seperti terlihat dari wawancara dengan Hosli sebagai pejabat Dinas Pertanian Kota Batu terkait kelompok tani Sekar Mulyo. Ia menyatakan, "*Rutinitas kelompok tani itu adalah mingguan, dua mingguan, bulanan. Mereka berkelompok kan di kampung mau mengadakan arisan. Pertemuan di situ semacam ada apa gitu ya, kembali ke jaman dulu. Akhirnya ada kehidupan guyub gitu yang rukun di kampung dengan cara wadahnya.*" Tidak heran jika kepentingan anggota lebih bisa diaspirasikan dan dengan itu kelompok tani memiliki kekuatan politik yang nyata di Desa Sidomulyo. Hal inilah yang menjadikan para anggotanya terus percaya terhadap kelompok tani ini, sehingga kelompok tani ini bisa lebih kompak dan solid mulai dari merumuskan sampai dengan mewujudkan kepentingan-kepentingannya dibandingkan dengan kelompok-kelompok tani lain di Desa Sidomulyo. Tono sebagai ketua kelompok juga mampu

bersifat lebih terbuka dan mengayomi anggota-anggotanya, sehingga rasa percaya akan terus terawat di internal kelompok tani Sekar Mulyo.

Selanjutnya, kelompok tani Sekar Mulyo mampu menjalankan norma-norma yang ada dan sesuai dengan keadaan masyarakat di Desa Sidomulyo. Hal tersebut terlihat ketika kelompok tani ini mampu menjalankan fungsi sosialnya, yaitu menjadikan hubungan antar para petani tanaman hias lebih akrab dan tempat untuk saling bersosialisasi. Hubungan yang akrab ini merupakan sebuah jaringan sosial yang menjadi bagian dari modal sosial (Putnam 1993). Kelanjutan dari adanya rasa saling percaya di dalam kelompok, sehingga kehadiran kelompok tani ini lebih mampu diterima oleh anggota-anggotanya. Apabila kelompok tani Sekar Mulyo tidak mampu menjalankan fungsi sosialnya dan bertentangan dengan norma-norma yang ada, maka anggotanya tidak akan merasa nyaman dan sangat memungkinkan untuk terjadi perpecahan.

Penjelasan mengenai modal sosial yang dimiliki oleh kelompok tani Sekar Mulyo di atas menunjukkan bahwa keberhasilan strategi *civil society* dipengaruhi oleh modal sosial yang dimilikinya. Tanpa adanya modal sosial, organisasi *civil society* tidak akan mampu memengaruhi kebijakan sesuai dengan kepentingannya karena tidak memiliki kedekatan dalam berkomunikasi baik dengan elite-elite desa maupun dengan masyarakat. Modal sosial dapat diartikan juga dapat menjadi dasar dalam menentukan strategi yang dipilih oleh *civil society*. Kelompok tani Sekar Mulyo menjelaskan bahwa sebuah organisasi *civil society* yang lahir dan dekat dari masyarakat akan membutuhkan modal sosial. Kelompok tani Sekar Mulyo yang berada di lingkup desa secara efektif telah mampu memanfaatkan modal sosial yang dimilikinya. Hal tersebut apabila dibandingkan dengan organisasi *civil society* yang berada di lingkup lebih luas, akan semakin susah untuk dipraktikkan karena berada semakin jauh dengan masyarakat *grassroots*. Masyarakat Desa Sidomulyo masih merupakan masyarakat yang *guyub* sehingga fungsi sosial dari adanya organisasi *civil society* akan lebih terasa dan dihargai (wawancara dengan Suharto Kepala Desa Sidomulyo, 2017).

HUBUNGAN KLIENTELISME KELOMPOK TANI SEKAR MULYO

Faktor terakhir yang membuat kelompok tani Sekar Mulyo berhasil memengaruhi kebijakan pemberian bantuan infrastruktur dan pertanian di Desa Sidomulyo adalah adanya hubungan klientelisme yang kuat. Kondisi kehidupan masyarakat Desa Sidomulyo yang bersifat kedekatan informal menjadikan hubungan klientelisme yang dimiliki lebih kuat. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya kedekatan kelompok tani ini dengan kepala desa dan anggota-anggota DPRD Kota Batu. Kedekatan ini akan semakin diperkuat ketika hubungan klientelisme yang dimiliki oleh kelompok tani telah sampai pada masyarakat Desa Sidomulyo, sehingga ketika terjadi komunikasi yang mencoba menyatukan kepentingan dalam rangka hubungan yang saling menguntungkan akan semakin mudah.

Relasi personal inilah yang menjadikan mereka sebagai aktor politik di Desa Sidomulyo untuk lebih dekat di dalam menjalin hubungan. Relasi personal ini penting karena setiap aktor politik akan lebih memilih dan percaya untuk bekerja sama dengan pihak yang sudah mengenal secara personal. Di Desa Sidomulyo, relasi personal antara kelompok tani Sekar Mulyo, Suharto, dan Sugeng, yang merupakan anggota DPRD Kota Batu, telah terbentuk sejak pertama kali kelompok tani ini terbentuk hingga saat ini (wawancara dengan Suharto, Kepala Desa Sidomulyo, 2017 dan Sugeng, Anggota DPRD Kota Batu, 2017).

Sugeng sebagai salah satu anggota DPRD Kota Batu menjelaskan bahwa terpilihnya ia sebagai anggota DPRD selama dua periode tidak terlepas dari dukungan kelompok tani Sekar Mulyo yang berhasil mendapatkan 1.000 suara dalam pemilihan DPRD Kota Batu. Tono juga menjelaskan bahwa keberhasilannya dalam mendapatkan bantuan infrastruktur selama ini juga adanya kedekatan dengan Suharto sebagai kepala desa karena kelompok taninya telah membantu mendukung Suharto dalam pemilihan kepala desa pada tahun 2013. Hubungan klientelisme antara kelompok tani Sekar Mulyo dengan Suharto dan Sugeng menjadikan terjadinya pertukaran kepentingan sehingga kelompok tani Sekar Mulyo selalu dibantu di dalam pengajuan bantuan infrastruktur

(wawancara dengan Tono Ketua kelompok tani Sekar Mulyo, 2017). Perlu dijelaskan pula bahwa antara faktor modal sosial dan hubungan klientelisme memiliki keterkaitan dan akan saling melengkapi sehingga menjadi daya tawar yang kuat bagi kelompok tani.

Komposisi kelompok tani Sekar Mulyo yang hanya terdiri dari petani lingkup desa dengan hubungan yang bersifat informal lebih mampu menumbuhkan rasa kebersamaan. Hal ini sebenarnya sama dengan kelompok tani lain, namun dikarenakan kelompok tani Sekar Mulyo merupakan kelompok tani tertua dan terbesar, maka hubungan klientelisme ini akan semakin mampu dijadikan modal dalam mewujudkan kepentingannya. Hubungan klientelisme yang dimiliki oleh kelompok tani Sekar Mulyo akan menciptakan pertukaran kepentingan. Inilah yang membuat strategi kelompok tani Sekar Mulyo berhasil dalam mendapatkan bantuan dari Pemerintah Kota Batu.

Analisis mengenai hubungan klientelisme yang dimiliki oleh kelompok tani Sekar Mulyo ini menunjukkan bahwa hubungan klientelisme akan menciptakan hubungan kerjasama yang lebih mendalam. Kedekatan organisasi *civil society* dengan aktor politik lain tidak hanya dibangun dengan kedekatan kelembagaan, namun di dalam lingkup masyarakat desa, kedekatan personal menjadi lebih efektif. Salah satu contohnya bisa diambil dari terpilihnya Suharto di dalam pemilihan kepala desa pada tahun 2013 melawan Jatmiko yang merupakan *incumbent*. Posisi sebagai *incumbent* tersebut seharusnya menguntungkan Jatmiko karena secara kelembagaan dia bisa dekat menjalin komunikasi dengan semua kelompok tani dan berbagai organisasi Desa Sidomulyo. Namun, adanya kedekatan personal Suharto dengan kelompok tani Sekar Mulyo membuatnya memenangkan pemilihan kepala desa.

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa hubungan klientelisme bagi organisasi *civil society* menjadi penting. Apabila melihat pada konteks organisasi *civil society* yang berada dalam cakupan luas, berdasarkan studi literatur di dalam artikel ini, hubungan klientelisme juga sangat penting bagi keberhasilan organisasi *civil society* sejak pertama kali dibentuk hingga menjalankan perannya. Hubungan antara organisasi *civil society* dan aktor-aktor politik seharusnya tidak bersifat kaku dalam

pengertian mengikuti prosedur kelembagaan, namun harus bisa lebih fleksibel selama masih bisa mewujudkan kepentingan satu sama lain.

KEBERHASILAN KELOMPOK TANI SEKAR MULYO MEMENGARUHI KEBIJAKAN

Strategi kolaboratif *civil society* adalah adanya sebuah kerjasama antara *civil society* dengan aktor-aktor politik lain di dalam sebuah pembuatan kebijakan (Short 1996). Namun, artikel ini menemukan jika di dalam kerja sama tersebut juga terjadi adanya pertukaran kepentingan yang mana di dalam konsep strategi kolaboratif tersebut kurang dijelaskan seperti apa agenda di dalamnya. Berkolaboratif saja tidak cukup bagi *civil society* yang tidak memiliki akses-akses terhadap sumber daya, melainkan juga harus ada pertukaran kepentingan sebagai hal yang akan menyatukan pihak-pihak yang bekerja sama (Allen 2013).

Konsep selanjutnya adalah modal sosial yang menjelaskan bahwa ketika sebuah kelompok masyarakat apabila memiliki modal sosial berupa rasa percaya, norma, dan jaringan bisa menjadi pendorong di dalam keberhasilan mewujudkan kepentingannya (Putnam 1993). Kelompok tani Sekar Mulyo telah mendapatkan kepercayaan, sesuai dengan norma yang berlaku, dan mengakar kuat di masyarakat. Namun, terdapat kekurangan dari konsep ini apabila diimplementasikan ke dalam lingkup yang lebih luas belum tentu bisa berhasil karena semakin luas lingkup *civil society* akan semakin jauh dari *grassroots* sehingga membuatnya tidak dekat dengan masyarakat. Hal tersebut terlihat dari adanya keberhasilan kelompok tani Sekar Mulyo memengaruhi kebijakan walaupun berada di dalam lingkup desa dengan membandingkan keberhasilan organisasi *civil society* yang kurang mampu memengaruhi kebijakan pemerintah di lingkup nasional.

Terakhir adalah terkait hubungan klientelisme. Sifat dinamis yang dimiliki oleh *civil society* menjadi bagian yang mampu menciptakan hubungan klientelisme yang bersifat lebih informal atau bukan kelembagaan, dan tindakan kolektif yang digerakkan oleh *civil society* menjadi lebih berpengaruh daripada kerangka lembaga formal (Aspinall dan Sukmajati 2015). Adanya kedekatan personal yang berlanjut dalam per-

tukaran politik telah menjadikan kelompok tani Sekar Mulyo sebagai salah aktor yang dibutuhkan oleh pihak-pihak yang terlibat di dalam konstestasi politik. Modal sosial yang dimiliki oleh kelompok tani ini akan dikerahkan untuk memberikan dukungan dan ditukarkan dengan bantuan infrastruktur yang dibutuhkan.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari artikel ini adalah bahwa keberhasilan kelompok tani Sekar Mulyo dalam memengaruhi kebijakan dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu strategi kolaboratif, modal sosial, dan hubungan klientelisme. Tiga faktor ini juga menjadi pembeda kelompok tani Sekar Mulyo dengan kelompok tani di Desa Sidomulyo. Lingkup dan latar belakang yang sama sebagai petani di Desa Sidomulyo tidak menjadikan kelompok-kelompok tani lain berhasil memengaruhi kebijakan, seperti kelompok tani Sekar Mulyo.

Tiga faktor keberhasilan ini saling memengaruhi dan menguatkan. Di dalam mengkaji keberhasilan sebuah organisasi *civil society* tidak bisa hanya melihat dengan konsep strateginya saja, melainkan faktor-faktor lain harus diperhatikan juga. Mengkaji dengan menggunakan strategi organisasi *civil society* saja tidak akan kuat menjawab pertanyaan mengapa organisasi *civil society* berhasil memengaruhi kebijakan, karena di dalam berbagai tinjauan pustaka menunjukkan bahwa bentuk strategi organisasi *civil society* satu dengan lainnya tidak jauh berbeda, perbedaan paling mendasar adalah bekerja sama dengan pemerintah atau konfrontasi.

Pentingnya tiga faktor keberhasilan ini juga ditunjukkan dengan adanya keberhasilan organisasi *civil society* yang hanya di lingkup desa dengan akses terhadap sumber daya yang lebih sedikit, sedangkan organisasi *civil society* yang berada di lingkup luas dan lebih memiliki akses terhadap sumber daya apabila tidak memperhatikan tiga faktor tersebut tidak akan berhasil memengaruhi kebijakan.

Artikel ini juga menunjukkan bahwa latar belakang organisasi *civil society* yang dekat dan tumbuh bersama *grassroots* juga menjadikannya kelompok yang berhasil memengaruhi kebijakan. Kedekatan inilah

yang seharusnya dimiliki oleh organisasi *civil society* lainnya. Tanpa adanya kedekatan, organisasi *civil society* tidak akan dirasakan atau diakui kehadirannya, sehingga tidak akan mendapatkan simpati dan dukungan dari masyarakat yang seharusnya diwakilinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Allen, Nathan. "Clientelism and the Personal Vote in Indonesia". Dipresentasikan dalam *Western Political Science Association Annual Conference*, 23 Maret 2013 di Portland.
- Aspinall, Edward dan Mada Sukmajati. 2015. *Politik Uang di Indonesia: Patronase dan Klientelisme pada Pemilu Legislatif 2014*. Yogyakarta: Penerbit PolGov.
- Bailer, Stefanie. *et al.*, 2009. "What Makes Civil Society Strong? Testing Bottom-up and Top-down Theories of a Vibrant Civil Society". *Conference of the Swiss Political Science*.
- Boix, Carles dan Daniel N. Posner. 1996. "Making Social Capital Work: A Review of Robert Putnam's Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy." *The Weatherhead Center for International Affairs Paper* No. 96-4. Boston: Harvard University.
- Cohen, Jean L. dan Andrew Arato. 1994. *Civil Society and Political Theory*. London: MIT Press.
- Cresswell, John W. 2003. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Method Approaches 2nd Edition*. California: SAGE Publication.
- Dagher, Ruby. 2017. "Civil Society and Development: A Reconceptualisation". *Canadian Journal of Development Studies* 38 (No. 1): 54-71.
- Diamond, Larry. 1994. "Rethinking Civil Society: Toward Democratic Consolidation". *Journal of Democracy* 5 (No.3): 4-17.
- Dinas Pertanian Kota Batu. 2016. "Data Inventarisasi Alat dan Mesin Pertanian Dinas Pertanian Kota Batu 2016 dan Data Hibah Bappeda Dinas Pertanian Kota Batu tahun Anggaran 2016-2017".
- Dwipayana, Ari. 2003. *Membangun Good Governance di Desa*. Yogyakarta: Institute of Research and Empowerment (IRE).

- Fukuyama, F. 1999. "Social Capital and Civil Society", *The International Monetary Fund. Conference on Second Generation Reforms*, 8-9 November 1999. Washington, D.C.: The Institute of Public Policy, George Mason University.
- Hadiz, Vedi R. 2013. "Decentralisation and Democracy in Indonesia: A Critique of Neo-Institutionalist Perspectives." *Working Papes Series* No. 47 City University of Hong Kong. Southeast Asia Research Centre.
- Harris, Jose. 2008. "Development of Civil Society.", dalam *The Oxford Handbook of Political Institutions*. R.A.W. Rhodes, Sarah A. Binder, dan Bert A. Rockman (Eds.), New York: Oxford University Press Inc.
- Kunreuther, Frances. 2011. "Grassroots Associations." dalam *The Oxford Handbook of Civil Society*. Michael Edwards (Ed.). New York: Oxford University Press.
- Mehta, Nayantara. 2009. "Nonprofits and Lobbying: Yes They Can!." *Jurnal Business Law Today* 18 (No. 4).
- Mohan, Giles. 2002. "The Disappointments of Civil Society: The Politics of NGO Intervention in Northern Ghana." *Political Geography* 21 (No.1): 125–154.
- Neuman, W. Lawrence. 2014. *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*. 7th Edition. Essex: Pearson Education Limited.
- Pemerintah Kota Batu. 2012. "SK Pengukuhan Walikota Batu No: 180/72/KEP/422.012/2012." Kota Batu: Pemerintah Kota Batu.
- Perdana, Aditya. 2009. "Civil Society dan Partai Politik dalam Demokratisasi di Indonesia." *Makalah Seminar Internasional ke-10: Representasi Kepentingan Rakyat pada Pemilu Legislatif*. Salatiga: Yayasan Percik.
- _____. 2015. "The Politics of Civil Society Organization (CSOs) Post-Reformation 1998." *Masyarakat: Jurnal Sosiologi* 20 (No. 1): 23-42.
- Putnam, Robert D. 1993. *Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy*. Princeton: Princeton University Press.

- Rai, Manoj Kumar. 2001. "Village Democracy and Civil Society." *Adult Education and Development* (No. 56).
- Short, John R. 1996. *The Urban Order: An Introduction to Cities, Culture and Power*. Cornwall: T.J. Press.
- Wawancara dengan Budi, anggota kelompok tani Sekar Mulyo, 13 Maret 2017.
- Wawancara dengan Hosli, Kepala Sub Bagian Program Dinas Pertanian Kota Batu, 24 Maret 2017.
- Wawancara dengan Sugeng, Mantan BPD Desa Sidomulyo, Mantan Ketua Gapoktan Tanaman Hias Kota Batu, Mantan Koordinator Gapoktan se-Kota, Mantan Ketua Pedagan Tanaman Hias, Pengurus Perhimpunan Anggrek IND DPR MALANG RAYA, Anggota DPRD Kota Batu periode 2009-2014, dan 2014-2019, 24 Maret 2017.
- Wawancara dengan Suharto, Kepala Desa Sidomulyo Kota Batu, 22 Maret 2017.
- Wawancara dengan Sunari, Ketua Gapoktan Desa Sidomulyo, 14 Maret 2017
- Wawancara dengan Tono, ketua kelompok tani Sekar Mulyo, 13 Maret 2017